

BULETIN WAHANA KOMUNIKASI

November 16, 2009



Suasana pertemuan di Hotel Atlet Century Jakarta



Ministry of Forestry

DFID Department for International Development



KEHATI
INDONESIAN BIODIVERSITY FOUNDATION

Rame-Rame Susun Pedoman Pelaksanaan & Rancang Tindak Implementasi P 38/2009

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif terkait dengan tata kelola kehutanan yang baik dan pemberantasan pembalakan liar, termasuk upaya perbaikan peraturan di bidang pengelolaan hutan produksi. Berbagai peraturan di bidang perusahaan hutan, baik di tingkat on-farm (ijin usaha pemanfaatan hasil hutan), di level off-farm (industri kehutanan/IUI dan IUI Lanjutan), maupun dalam hal pemindahan hasil hutan (kayu) sejak dari hutan menuju ke industri akhir, secara bertahap disempurnakan sesuai perkembangan situasi dan kemajuan teknologi.

Pada tataran implementasi, peraturan-peraturan dimaksud dapat dinilai akuntabilitas pelaksanaannya. Namun demikian, pada kenyataannya pasar kayu internasional tetap mempertanyakan

kredibilitas produk perikanan Indonesia, baik menyangkut legalitas produk kayu maupun sertifikasi ekolabel atau pengelolaan hutan lestarinya.

Trend perdagangan kayu dunia memang mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini disebabkan negara-negara importir kayu tidak mau dituduh membiarkan terjadinya perdagangan kayu hasil pembalakan liar yang mengancam ekologi bumi, apalagi bila dihubungkan dengan perubahan iklim global akibat emisi karbon dari hutan. Pemerintah Jepang menetapkan "Green-Konjuho" yang mengatur importasi kayu hanya berasal dari sumber yang sah. Pemerintah Amerika Serikat meng-amandemen Lacey Act yang memungkinkan ancaman sanksi pidana bagi pihak-pihak yang dengan sengaja memungkinkan terjadinya importasi hasil kehutanan ilegal ke wilayah kepabeanan

mereka. Komisi Eropa mendorong suatu Perjanjian Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership Agreement-VPA) dengan negara produsen kayu untuk menjamin bahwa tidak ada produk perikanan ilegal atau tidak dapat dibuktikan keabsahannya yang memasuki pasar Uni Eropa. Masih banyak negara-negara lain yang sudah mulai menerapkan "Green Procurement Policy" untuk menghambat masuknya kayu-kayu yang berasal dari ilegal logging ke negara mereka.

Untuk menjawab tantangan tadi, MFP bersama-sama jajaran BPK Deput termasuk POKJA yang ditunjuk seperti Pokja Monitoring, Pokja Sosialisasi, Pokja Peningkatan Kapasitas dan Pokja Penyusunan Protocol dan prosedur mengadakan pertemuan berkordinasi menyiapkan langkah-langkah penting implementasi SVLK.

Empat Working Group kumpul bekerja

Siapkan Rancang Tindak Implementasi P38/09

Tiga hari di hotel atlet century- Jakarta, yaitu 15-17 Oktober 2009, masing-masing working group melakukan perencanaan bersama. Working group peningkatan kapasitas telah menunjukkan progress dan siap melakukan pelatihan kepada sejumlah auditor dan LPVI sekaligus ujicoba atas modul kurikulumnya.

Working group monitoring, telah menetapkan agenda kedepan serta mempresentasikan pada anggota working group lainnya untuk koordinasi dan memberi input. Rencana kerja KPLK bagian dari Working group peningkatan kapasitas adalah:

(A) Mengembangkan metode dan instrumen monitoring dan mekanisme pelaporan seperti: (1) Instrumen pemantauan terhadap lembaga LPVI (2) Standar pelaporan lembaga pemantau LPVI (3)Protokol pelaporan keberatan/keluhan

(B) Mengembangkan dan membangun jejaring kerja dan kapasitas sbb: (1)Jejaring kerja pemantau lembaga LPVI (2) Modul pengembangan kapasitas jejaring pemantau lembaga LPVI

(C) Mengembangkan penjangkauan dan pengkomunikasian sbb:(1)Internal dan eksternal media (2) Standard komunikasi dan informasi (3)Pusat Informasi Kayu

(D)Memberikan masukan untuk perbaikan peraturan , kebijakan, prosedur, mekanisme dan standard: (1)Policy brief, policy paper, working paper (2) Dokumen rekomendasi

(E).Mengembangkan kerjasama dan sinergi dengan kelompok kerja yang lain seperti: (1)Kerjasama dan kesepahaman (2) Konsolidasi

Sedangkan Working group sosialisasi yang telah melakukan kegiatannya sebelum, menganalisa berbagai perbaikan metode dan jangkauan kegiatan sosialisasi berikutnya sesuai kebutuhan. Misalnya WG Sosialisasi menargetkan sosialisasi pada Top manajemen Industri, bea cukai dan POLRI serta PEMDA, Pers dll. Selain itu metode sosialisasi juga diperluas seperti Seminar, workshop, Kampanye dan Media release seperti TV, media cetak dslb.

Pada pertemuan ini, disepakati pula peran Working group Pedoman dibawah koordinasi BPK, untuk mengisi kelengkapan dokumen dalam penyusunan pedoman-pedoman yang diperlukan pada setiap aturan protokol dan aturan terkait implementasi SVLK, misalnya pedoman tambahan yang dibutuhkan pada penilaian kinerja PHPL, VLK pada industri dan lainnya.

Dedi Haryadi mewakili WG Monitoring tengah mempresentasikan agenda kerjanya.

